



TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BULELENG 2018



**DINAS STATISTIK
KABUPATEN BULELENG**



LAMBANG KOTA SINGARAJA

TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BULELENG 2018



Ir. I KETUT NERDA
KEPALA DINAS STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BULELENG 2018

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buleleng, diperlukan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi yang matang. Kegiatan tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh data dan informasi yang tepat dan terpercaya. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Buleleng menyusun publikasi ini dalam rangka mengetahui capaian pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Upaya penyusunan publikasi Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng 2018 ini, diharapkan mampu memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian seperti struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati begitu, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemerhati pembangunan daerah sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah

memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Singaraja, Nopember 2018

Kepala Dinas Statistik
Kabupaten Buleleng



Ir. I Ketut Nerda

NIP. 19600606 198901 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KATALOG.....	ii
LAMBANG KABUPATEN BULELENG.....	iii
FOTO.....	v
KATA SAMBUTAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	6
1.3 Sumber Data.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN.....	9
2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	11
2.2 Ruang Lingkup Kategori PDRB.....	14
2.3 Analisis <i>Location Quetient</i>	25
2.4 Analisis <i>Shift Share</i>	26

BAB III	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BULELENG.....	29
BAB IV	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BULELENG	37
BAB V	STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BULELENG.....	47
BAB VI	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PERKAPITA KABUPATEN BULELENG.....	57
BAB VII	POTENSI EKONOMI KABUPATEN BULELENG.....	63
	LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan xTahun 2016-2017.....	36
TABEL 4.1	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng Menurut lapangan Usaha, 2016-2017 (persen)	43
TABEL 6.1	Indikator Agregatif PDRB kabupaten buleleng, 2016-2017.....	61

TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BULELENG 2018

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Persentase PDRB Kabupaten Buleleng Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017 (Persen)	32
GAMBAR 3.2	PDRB Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017 (milyar rupiah).....	34
GAMBAR 3.3	Peningkatan PDRB Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017 (milyar rupiah).....	35
GAMBAR 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2012—2017 (Persen).....	40
GAMBAR 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2012-2017 (Persen).....	45
GAMBAR 5.1	Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, Tersier dalam PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2017 (Persen)	50
GAMBAR 5.2	Lima Kontributor Terbesar PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2017 (Persen).....	52

GAMBAR 5.3	Kontribusi Kategori Pertanian di Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2017 (Persen).....	54
GAMBAR 6.1	Perbandingan PDRB PerKapita Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2016-2017 (rupiah)	62

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	PDRB Seri 2010 Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (juta rupiah)	65
LAMPIRAN 2	PDRB Seri 2010 Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013–2017.....	66
LAMPIRAN 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017.....	67
LAMPIRAN 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2017.....	68
LAMPIRAN 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2017.....	69

LAMPIRAN 6	Tabel Perkapita Produk Domestik regional Bruto Kabupaten/kota Propinsi bali 2016-2017 (ribuan rupiah).....	70
LAMPIRAN 7	Laju Inflasi/Deflasi Kab. Buleleng 2015-2017.....	71
LAMPIRAN 8	Angka laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Propinsi Bali 1993-2017.....	72
LAMPIRAN 9	Angka Agravatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng 2016-2017.....	73



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolak ukur pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi, dimana sektor ekonomi selalu menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita, pemerintah juga menempatkan pembangunan ekonomi sebagai salah satu fokus program pemerintah selama lima tahun kedepan yaitu ingin mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tidak hanya pada level nasional saja, masing-masing pemerintah daerah pun tetap berupaya pembangunan ekonomi di daerahnya berjalan sesuai harapan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakatnya.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki misi dalam upaya pembangunan ekonomi yaitu percepatan pembangunan

ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata, dan berkualitas dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah. Dengan landasan pengembangan ekonomi kerakyatan, diharapkan pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng tidak hanya tumbuh, namun hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sudah tentu hal ini akan memperkuat pondasi pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng di segala bidang.

Perlu disadari bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Buleleng tidak hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu upaya-upaya pembangunan yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan masyarakatnya sehingga akan memperkuat pondasi pembangunan Kabupaten Buleleng di segala bidang.

Upaya pembangunan perekonomian khususnya dalam meningkatkan pendapatan Kabupaten Buleleng dan kesejahteraan pada umumnya telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian masih ditemukan kehidupan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak

berkelanjutan dan berkembang ke arah yang menimbulkan kecemburuan sosial. Perluasan dan penataan dunia usaha masih perlu ditingkatkan dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata melalui mantapnya iklim yang mendukung pembinaan dan peningkatan usaha informal seperti usaha rumahtangga, usaha kecil dan menengah. Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, harapan pemerintah khususnya Kabupaten Buleleng yang ingin dicapai yaitu mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan pendapatan masyarakat yang lebih merata, serta memperluas kesempatan kerja.

Langkah awal yang yang dapat dilakukan dalam pembangunan ekonomi yang matang yaitu melakukan perencanaan yang mantap dan akurat dimana pada akhirnya bisa dicapai hasil-hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perencanaan pembangunan selalu dibutuhkan data yang tepat dan terpercaya sebagai sarana penunjang yang melandasi perencanaan pembangunan dan juga sebagai landasan evaluasi kebijakan terdahulu yang sudah dilaksanakan agar kedepannya dapat dicapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melihat pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Buleleng, perlu diketahui bagaimana perkembangan ekonomi yang dilihat dari struktur, tingkat, dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun dan dirinci menurut lapangan usaha/ sektoral. Data PDRB ini akan disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010.

1.2 Tujuan Penulisan

Penerbitan publikasi Tinjauan Ekonomi Kabupaten Buleleng 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Buleleng meliputi nilai tambah sektoral, struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita di Kabupaten Buleleng dari tahun 2012-2017. Di dalamnya juga diselipkan data penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor sehingga dapat diketahui sektor mana yang seharusnya dikembangkan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh hingga terbitnya publikasi ini adalah data yang berasal dari BPS.

1.4 Sistematika Penulisan.

Publikasi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

- Bab I : Pendahuluan, menguraikan gambaran umum, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penulisan.
- Bab II : Ruang Lingkup dan Metode Penghitungan.
- Bab III : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng
- Bab IV : Laju Pertumbuhan Ekonomi Buleleng
- Bab V : Struktur Ekonomi Kabupaten Buleleng
- Bab VI : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng
- Bab VII : Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Buleleng.



BAB II

RUANG LINGKUP METODE ANALISIS



BAB II

RUANG LINGKUP METODE ANALISIS

2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Teknik perhitungan PDRB ada dua yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.

Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

1. Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas data PDRB;
3. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;

5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Sementara implementasi adanya perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, terjadi perubahan klasifikasi yang digunakan oleh BPS yaitu dari 9 lapangan usaha menjadi 17 kategori.

2.2 Ruang Lingkup Kategori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi

kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan penangkapan ikan di laut. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.

2.2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Buleleng hanya terdapat penggalian lainnya saja. Kegiatan yang mencakup penggalian lainnya yaitu penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian.

2.2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan,

saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan endistribusi listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

2.2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

2.2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

2.2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan

minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Sementara penyediaan makan minum mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "*self service*" atau restoran "*take away*", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2.2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

2.2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat

serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

2.2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa

reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

2.2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

2.2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang

terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

2.2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus

Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

2.2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

2.3 Analisis *Location Quotient*

Selain struktur ekonomi, untuk melihat potensi unggulan di suatu wilayah dapat pula digunakan metode analisis LQ (*Location Quotient*). Pada umumnya analisis LQ untuk dapat menentukan sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah, sedangkan sektor nonbasis merupakan sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh tersebut (Tarigan, 2005).

Nilai yang diperoleh dari analisis LQ mengindikasikan sebagai berikut:

1. Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat propinsi, atau dapat dikatakan daerah tersebut memiliki potensi ekspor dalam kegiatan tertentu.
2. Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah di atasnya atau dengan kata lain daerah tersebut memiliki kecenderungan impor.
3. jika $LQ = 1$, tingkat spesialisasi wilayah perencanaan sama dengan tingkat wilayah di atasnya, atau dapat dikatakan bahwa daerah yang bersangkutan telah mencukupi kebutuhannya dengan kegiatan tertentu.

2.4 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift-share* juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi keunggulan, mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Analisis *Shift-*

share menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional, maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional beserta sektor-sektornya. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut (Soepono,1993:44)



BAB III

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BULELENG



BAB III

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BULELENG

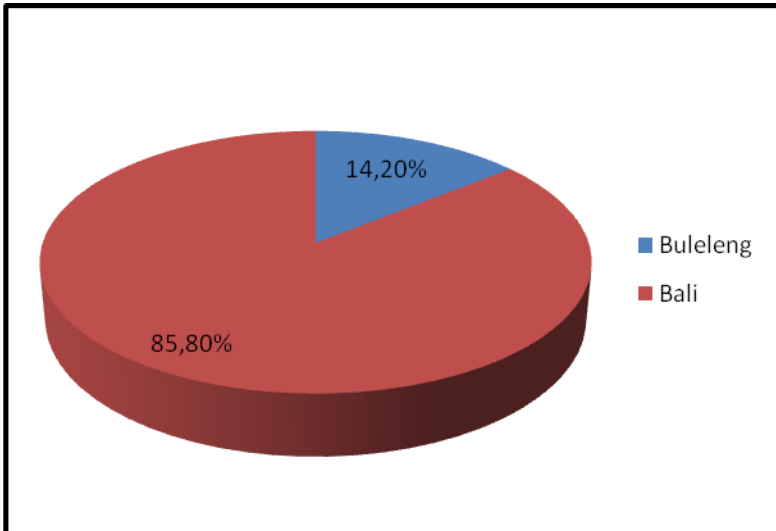
Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata, dan berkualitas, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Buleleng mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengembangan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Hal ini ditujukan agar pembangunan ekonomi tidak hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga dilakukan untuk membantu pemerataan pendapatan masyarakat dan hasil-hasilnya.

Kabupaten Buleleng memiliki luas seperempat bagian dari luas Pulau Bali secara keseluruhan. Dengan luas wilayah yang paling luas diantara seluruh Kabupaten/Kota se Bali, maka dapat dipastikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng juga melimpah. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng selain pembangunan infrastruktur yang terus dibenahi. Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2017 sebesar 30.589,2

milyar rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk pada tahun 2016 mencapai 27.748,11 Milyar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,841 Milyar rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada tahun 2017, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,20 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

GAMBAR 3.1

Persentase PDRB Kabupaten Buleleng Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

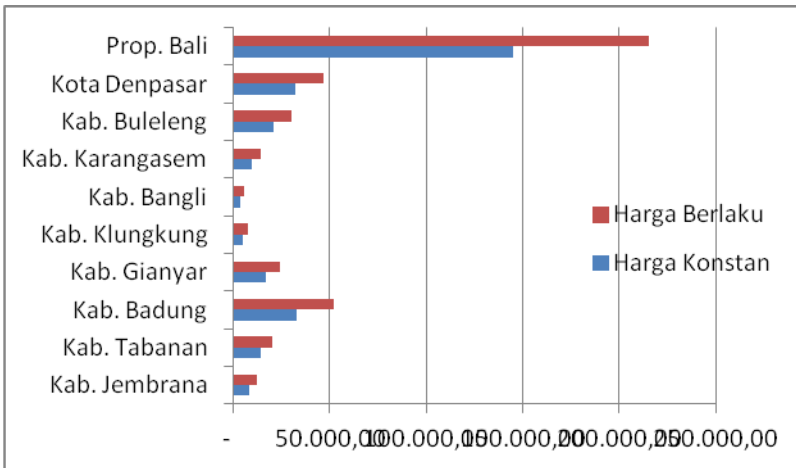
Kendala jarak yang cukup jauh dari Ibukota Provinsi, ternyata tidak menyurutkan pembangunan

ekonomi di Kabupaten Buleleng. Dibandingkan dengan Sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, nilai PDRB Kabupaten Buleleng berada pada posisi ketiga. PDRB Kabupaten Buleleng memang berada di bawah nilai PDRB Kabupaten Badung dan PDRB Kota Denpasar yang masing-masing tercatat sebesar 52.332,51 milyar rupiah dan 47.156,02 milyar rupiah. Namun peningkatan nilai PDRB di Kabupaten Buleleng ternyata mampu melebihi peningkatan nilai PDRB Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah lebih dekat dengan Ibukota Provinsi yaitu Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar. Tercatat peningkatan nilai PDRB Kabupaten Buleleng sebesar 2.841,09 milyar rupiah, sementara Kabupaten Tabanan sebesar 1.885,90 milyar rupiah dan Gianyar sebesar 2.193,23 milyar rupiah.

Upaya Kabupaten Buleleng dalam pembangunan ekonomi diantara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dirasa sangat positif mengingat Kabupaten Buleleng banyak melakukan gerakan-gerakan yang mengangkat ekonomi masyarakat seperti berbagai gelaran festival yang mampu mendorong UMKM dalam meningkatkan produksi. Selain itu geliat perekonomian Kabupaten Buleleng yang semakin membaik juga telah tampak setelah adanya wacana pendirian bandar udara di wilayah Kabupaten

Buleleng serta pembangunan jalan baru pada ruas sukasada mengwi untuk mempercepat akses transportasi dari Denpasar ke Singaraja atau sebaliknya.

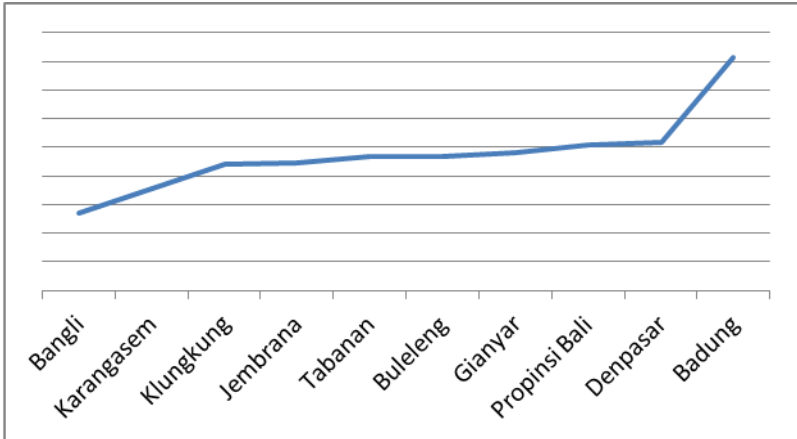
GAMBAR 3.2
PDRB Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017
(milyar rupiah)



Sumber : BPS

GAMBAR 3.3

Peningkatan Nilai PDRB Perkapita Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017
(milyar rupiah)



Sumber: BPS (diolah)

Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng secara riil tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB tahun 2017 sebesar 21,028 milyar rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 5,12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 19,950 milyar rupiah. Ini merupakan hal yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi, mengingat ekonomi di Kabupaten Buleleng masih tumbuh positif pada tahun 2017.

TABEL 3.1

PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2016-2017 (dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2016*)	2017**)	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,270,088.59	6,781,171.23	4,177,191.88	4,305,160.74
2.Pertambangan dan Penggalian	346,236.19	334,929.64	246,726.70	231,750.39
3.Industri Pengolahan	1,662,623.64	1,792,332.83	1,163,647.66	1,198,747.17
4.Pengadaan Listrik dan Gas	40,193.75	50,920.47	27,441.48	28,535.57
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37,332.35	41,625.26	31,110.53	32,766.61
6.Konstruksi	2,340,410.82	2,538,543.69	1,700,914.83	1,793,401.32
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,105,677.20	3,530,674.35	2,313,512.69	2,476,779.57
8.Transportasi dan Pergudangan	339,325.76	359,188.99	261,056.48	269,869.74
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,952,361.52	5,626,860.56	3,109,259.35	3,409,668.15
10.Informasi dan Komunikasi	1,467,693.72	1,621,447.02	1,336,330.07	1,454,962.26
11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1,199,898.18	1,285,653.78	879,883.25	904,940.54
12.Real Estat	1,277,884.77	1,374,473.46	1,038,062.25	1,094,337.43
13.Jasa Perusahaan	185,611.11	205,744.83	134,294.08	142,581.74
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,443,399.90	1,536,911.99	1,241,940.27	1,206,696.53
15.Jasa Pendidikan	1,989,482.38	2,289,657.52	1,485,726.41	1,616,900.16
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	592,824.48	658,005.02	444,462.41	474,094.46
17.Jasa lainnya	497,067.21	561,058.26	359,158.01	386,919.91
Produk Domestik Regional Bruto	27,748,111.57	30,589,198.90	19,950,718.35	21,028,112.29



BAB IV

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BULELENG



BAB IV

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BULELENG

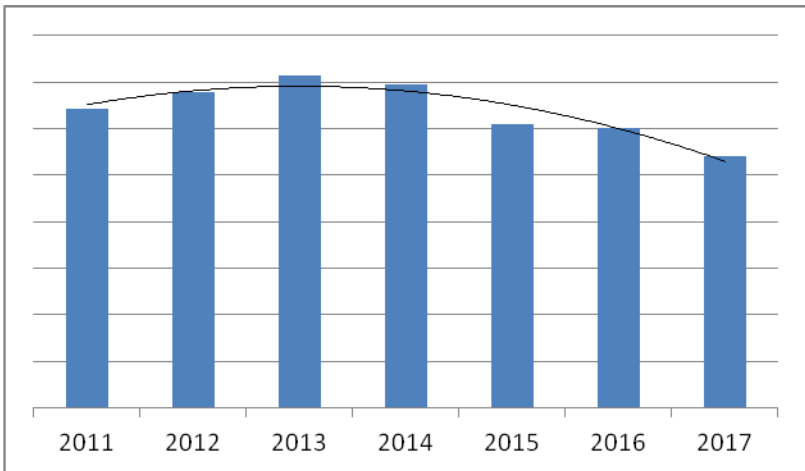
Indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dihasilkan oleh seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Dalam penghitungan PDRB Atas Dasar harga Konstan faktor harga pada tahun

berjalan/bersangkutan telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan perkataan lain seluruh produksi maupun biaya antara pada tahun berjalan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010. Dengan memakai patokan tahun dasar ini bisa dilihat perkembangan produksi yang dihasilkan suatu daerah yaitu produksi barang dan jasa dari sektor-sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Buleleng.

GAMBAR 4.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, 2011– 2017 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 mengalami penurunan,

bahkan laju pertumbuhan ekonomi propinsi Bali ikut mengalami penurunan. Untuk Kabupaten Buleleng hampir disemua sektor mengalami penurunan pertumbuhan, misalnya dari sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sampai minus (-6,07) yang disebabkan adanya penutupan fasilitas penggalian gol C akibat dari adanya erupsi gunung Agung dan juga sektor yang mengalami penurunan sampai minus adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan sebesar -2,84. Akan tetapi adapula beberapa sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi sebesar 7,06 kemudian dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,66 dan dari sektor Real Estat sebesar 5,2. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng terjadi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Hal ini diduga karena digulirkannya wacana pendirian Bandar udara yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng. Salah satu efek domino dari adanya wacana tersebut adalah terdongkraknya berbagai aktivitas ekonomi terutama percepatan investasi dan pembangunan properti di Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan laju

pertumbuhan kategori Konstruksi yang pada tahun 2012 melesat tajam sebesar 19,62 persen. Kategori lain yang juga meningkat cukup tajam pada tahun tersebut adalah kategori Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Bersih. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya percepatan pembangunan properti yang sedang berjalan pada tahun tersebut karena permintaan pasokan listrik dan air juga meningkat. Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik yaitu sebesar 12.429 pelanggan.

Pertumbuhan ekonomi Buleleng tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,15 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong jasa keuangan dan asuransi 14,35 persen, jasa pendidikan 14,62 persen, serta jasa kesehatan sebesar 13,65 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada kategori jasa keuangan dan asuransi didorong oleh meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan sebagai dampak dari diturunkannya BI Rate menjadi 5,75 persen pada tahun 2012. Penurunan BI rate ini menyebabkan bank umum berlomba-lomba memberikan bunga yang kompetitif kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin banyak yang menggunakan produk dari lembaga keuangan bank.

TABEL 4.1.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng
Menurut Lapangan Usaha, 2016–2017 (Persen)

Lapangan Usaha	2016*)	2017**)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,18	3,06
2.Pertambangan dan Penggalian	9,12	-6,07
3.Industri Pengolahan	3,47	3,02
4.Pengadaan Listrik dan Gas	7,83	3,99
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,41	5,32
6.Konstruksi	6,65	5,44
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,88	7,06
8.Transportasi dan Pergudangan	4,85	3,38
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,25	9,66
10.Informasi dan Komunikasi	9,76	8,88
11.Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	2,85
12.Real Estat	2,45	5,42
13.Jasa Perusahaan	6,44	6,17
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,81	-2,84
15.Jasa Pendidikan	11,06	8,83
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,35	6,67
17.Jasa lainnya	8,28	7,73
Produk Domestik Regional Bruto	6,02	5,40

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

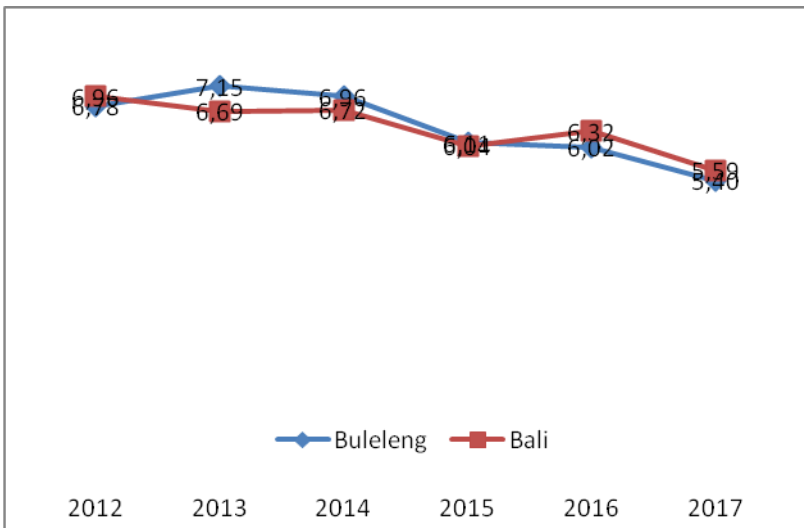
Catatan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Disisi lain, dorongan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang berasal dari kategori pendidikan disebabkan oleh pembukaan fakultas baru di salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Buleleng serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di wilayah Kabupaten Buleleng. Tidak hanya itu, dorongan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kategori kesehatan, bermula dari pemerintah daerah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Provinsi Bali yaitu Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Hal ini membantu masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih layak.

Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mencapai 6,02 persen. Pada tahun ini laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu pula memasuki tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan hingga mencapai 5,40 persen. Demikian halnya dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang juga mengalami perlambatan yang

mencapai 5,59 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6,32 persen.

GAMBAR 4.2
 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2012– 2017
 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 didorong oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi sebesar 7,06 persen. Kemudian diikuti oleh jasa real estate yang mencapai 5,42 persen, Jasa Penyediaan Akomodasi makan dan minum mencapai 9,66 persen. Sedangkan kategori lainnya mengalami

perlambatan pertumbuhan pada tahun 2017, khususnya sector pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan yang mencapai -6,07 persen dan sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan yang mencapai perlambatan -2,84 persen.



BAB V

STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BULELENG



BAB. V

STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BULELENG

Struktur ekonomi suatu wilayah merupakan komposisi peranan masing-masing sektor menurut lapangan usaha dalam perekonomian. Struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan masing-masing kategori dalam mengambil peranan kue pembangunan ekonomi di suatu wilayah sehingga dapat diketahui potensi dari wilayah tersebut. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah/wilayah adalah distribusi persentase dari nilai tambah bruto menurut kategori.

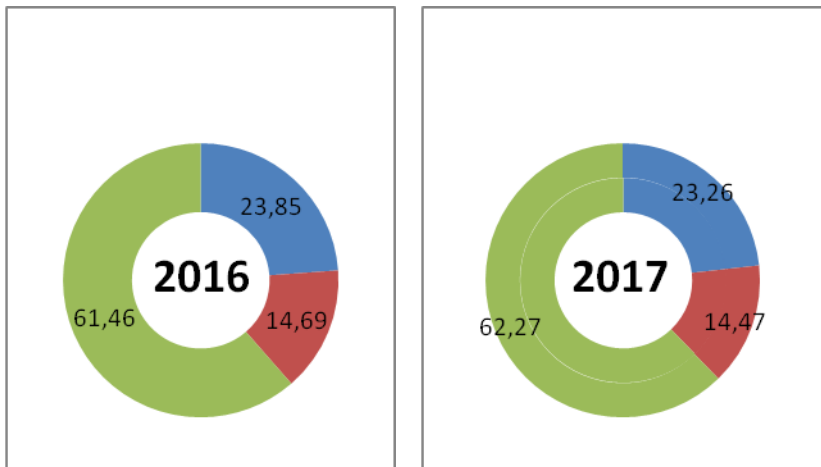
Perkembangan indikator struktur ekonomi secara sederhana dapat dilihat melalui tiga pengelompokan sektor yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Kelompok sektor primer merupakan gabungan dari kategori pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari kategori industri pengolahan/manufaktur, kategori listrik, gas dan air dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier merupakan gabungan dari kategori perdagangan, penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum, angkutan, infokom, keuangan,

keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan serta kategori jasa-jasa lainnya.

Dari **GAMBAR 5.1** dapat diketahui bahwa peranan sektor tersier masih mendominasi di Kabupaten Buleleng dengan total capaian *share* pada tahun 2017 sebesar 62,27 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 61,46 persen.

GAMBAR 5.1

Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, Tersier dalam PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2017 (Persen)

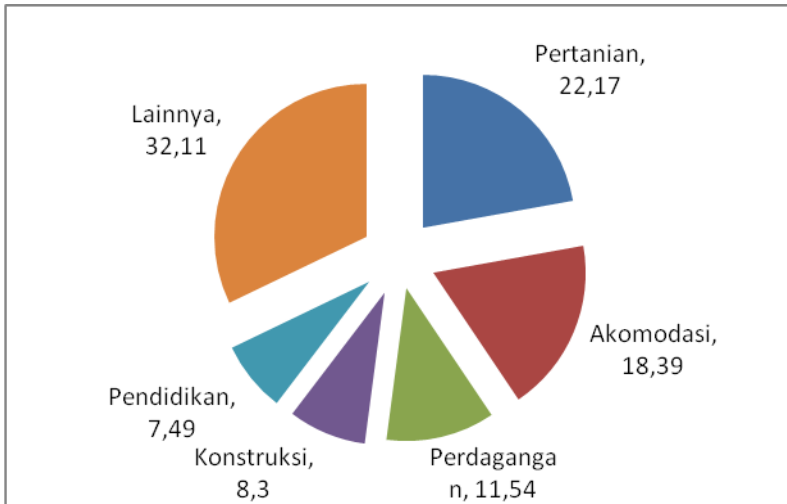


sumber: BPS (diolah)

Apabila kita melihat lebih rinci menurut kategori pembentuk PDRB, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2017, kategori pertanian masih

mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng dengan *share* sebesar 22,17 persen. Sementara di posisi kedua, pariwisata yang diwakili oleh kategori akomodasi dan penyediaan makan minum memberikan kontribusi sebesar 18,39 persen. Kategori lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Buleleng adalah perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2016 kontribusi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng sebesar 11,54 persen. Kemudian kategori konstruksi dan jasa pendidikan menduduki posisi keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,30 persen dan 7,49 persen.

GAMBAR 5.2
 Lima Kontributor Terbesar
 PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2017 (Persen)



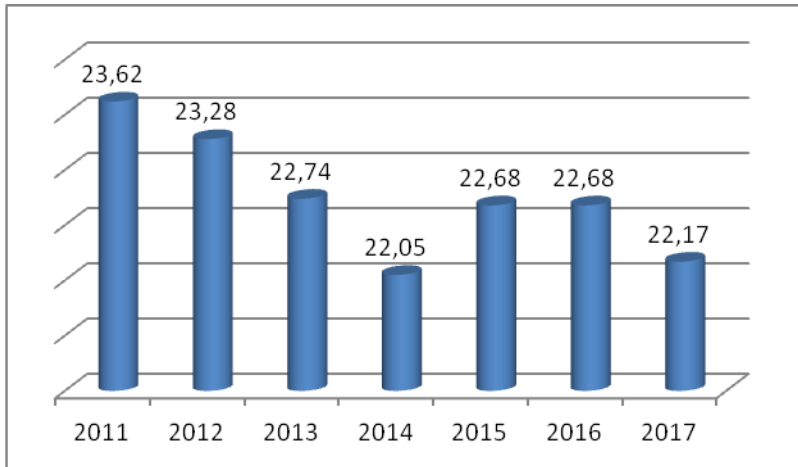
Sumber: BPS (diolah)

Tidak bisa dipungkiri kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng. Kategori pertanian memiliki kontribusi yang cenderung mengalami penurunan. Namun pada tahun 2017 kategori pertanian mampu meningkatkan *share* terhadap perekonomian Kabupaten Buleleng dengan mempertahankan dari total *share* sebesar 22,17 persen. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat potensi wilayah Kabupaten Buleleng masih di sektor pertanian. Dengan total luas lahan sawah sebesar 10.780 ha,

Kabupaten Buleleng masih mampu menjaga ketahanan pangannya bahkan menjadi pensuplai beras kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas produksi kategori pertanian dengan selalu memantau alih fungsi lahan pertanian di kawasan Bali Utara.

Meningkatnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Buleleng salah satunya disebabkan pada tahun 2017, baik dari Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengadakan Program Upaya Khusus (UPSUS) di berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Program UPSUS tersebut meliputi adanya perbaikan jaringan irigasi, kegiatan optimasi lahan, serta berbagai kegiatan lain yang mampu meningkatkan produksi padi di wilayah Kabupaten Buleleng.

GAMBAR 5.3
Kontribusi Kategori Pertanian di Kabupaten Buleleng
Tahun 2011-2017 (Persen)



Salah satu contoh sistem yang dilaksanakan dalam upaya optimasi lahan di Kabupaten Buleleng adalah dengan sistem tanam jajar legowo 2:1. Sistem ini memiliki jarak tanam yang mudah diatur sehingga populasi tanaman per hektarnya semakin tinggi. Selain itu dengan sistem tanam ini lebih memudahkan tanaman padi untuk mendapatkan sinar matahari sehingga diharapkan produktivitasnya semakin meningkat. Upaya-upaya ini perlu diteruskan mengingat tantangan terhadap wacana swasembada pangan dan ketahanan pangan terus meningkat. Mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng, baik dari sumber

daya alam maupun sumber daya manusia (35.73 persen penduduk bekerja di sektor pertanian), maka diharapkan Kabupaten Buleleng masih bisa mewujudkan wacana tersebut.

Sementara itu, kategori yang memberikan kontribusi terbesar setelah pertanian adalah kategori akomodasi dan penyediaan makan minum. Kategori ini tidak dapat berdiri sendiri dan sangat tergantung dari kondisi eksternal. Adanya gejala-gejala eksternal seperti bencana alam gunung meletus sangat berdampak pada jumlah para wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Buleleng pada khususnya. Dari segi geografis pun Kabupaten Buleleng cukup jauh dibandingkan dengan objek wisata lainnya di Provinsi Bali sehingga Kabupaten Buleleng perlu memiliki daya tarik tersendiri guna lebih meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang memiliki kontur tanah yang beragam, diharapkan dapat menunjang pariwisata di Kabupaten Buleleng dengan meningkatkan potensi agrowisata sebagai salah satu daya tarik yang dapat dikembangkan di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2017, kontribusi kategori akomodasi dan makan minum mampu

mencapai 18,39 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 17,85 persen.



BAB VI

PDRB PERKAPITA EKONOMI BULELENG



BAB. VI

PDRB PERKAPITA EKONOMI BULELENG

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan semakin sejahtera suatu daerah/wilayah. Kendati begitu, PDRB per kapita merupakan angka agregat, sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduknya.

PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 tercatat sebesar 30.589,20 milyar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Buleleng menerima pendapatan sebesar 46,80 juta rupiah selama tahun 2017. Angka ini masih dibawah PDRB perkapita Provinsi Bali yang mencapai 50,71 juta rupiah. PDRB perkapita Kabupaten Buleleng ini meningkat sebanyak 4,12 juta rupiah atau 8,80 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2011 – 2017, rata-rata pendapatan

perkapita penduduk Kabupaten Buleleng mencapai 32 juta rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, maka PDRB perkapita Kabupaten Buleleng Tahun 2017 adalah sebesar 32,17 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB perkapita Provinsi Bali yang mencapai 34,14 juta rupiah. Laju peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan sebesar 1,14 persen masih jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng di tahun 2016 yang hanya sebesar 0,54 persen. Selengkapnya dapat disimak pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Buleleng,
2016 – 2017

Rincian	Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan th. 2010	
	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)
NILAI ABSOLUT		
- PDRB Harga Berlaku (miliar Rp)	27,748.11	30,589.20
- PDRB Harga Konstan (miliar Rp)	19,950.72	21,028.11
- Jumlah penduduk pertengahan tahun(000 jiwa)	650.10	653.60
- PDRB per kapita Harga Berlaku (juta Rp)	42.68	46.8
- PDRB per kapita Harga Konstan (juta Rp)	30.69	32.17
INDEKS (2010 = 100)		
- PDRB Harga Berlaku	203.73	225.59
- PDRB Harga Konstan	146.48	154.39
- Perkembangan penduduk pertengahan tahun	103.82	104.38
- PDRB per kapita Harga Berlaku	196.24	194.2
- PDRB per kapita Harga Konstan	141.09	139.88
INDEKS IMPLISIT		
Produk Domestik Regional Bruto	139.08	145.47

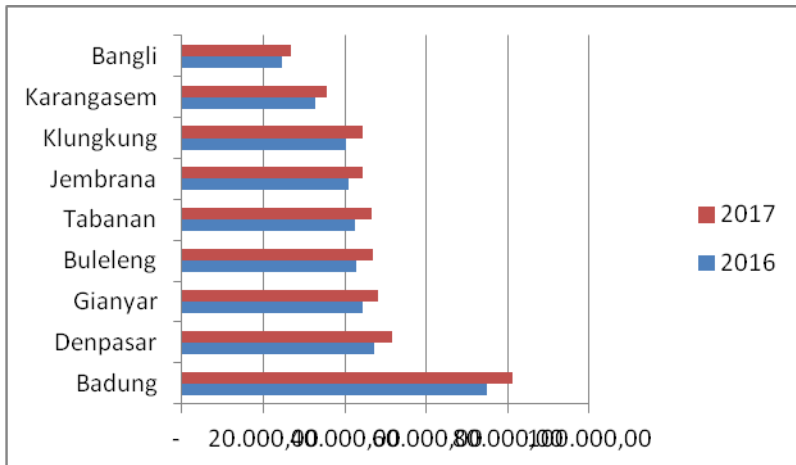
Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Catatan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Apabila dibandingkan menurut kabupaten/kota se Provinsi Bali maka nilai PDRB perkapita Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 berada pada posisi keempat yaitu sebesar 46.80 juta rupiah. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di Bali yaitu Kabupaten Badung (81,32 juta rupiah), Kota Denpasar (51,58 juta rupiah), dan Kabupaten Gianyar (48,26 juta rupiah).

GAMBAR 6.1

Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2016-2017 (ribu rupiah)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

PDRB Seri 2010 Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,354,338.8	4,926,772.7	5,827,841.72	6,365,396.59	6,781,171.23
B	Pertambangan dan Penggalian	277,969.5	312,473.1	309,350.65	368,236.19	334,929.64
C	Industri Pengolahan	1,108,797.3	1,312,046.6	1,523,192.24	1,651,519.14	1,792,332.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,016.2	21,185.7	28,270.31	38,372.88	50,920.47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,096.1	30,316.2	33,362.67	36,832.35	41,625.26
F	Konstruksi	1,758,342.4	1,911,311.3	2,179,944.08	2,350,410.82	2,538,543.69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,157,654.2	2,552,611.4	2,915,780.27	3,092,677.20	3,530,674.35
H	Transportasi dan Perhubungan	249,710.5	299,768.4	318,169.35	332,275.76	359,188.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,172,753.8	3,976,744.1	4,568,390.83	5,142,361.52	5,626,860.56
J	Informasi dan Komunikasi	1,029,940.9	1,156,206.3	1,329,434.19	1,493,693.72	1,621,447.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	879,618.0	1,033,479.6	1,112,633.96	1,194,221.34	1,285,653.78
L	Real Estat	993,398.0	1,155,815.1	1,219,217.11	1,257,884.77	1,374,473.46
M, N	Jasa Perusahaan	120,234.2	140,228.2	161,312.55	184,611.11	205,744.83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,028,484.0	1,196,011.1	1,302,672.06	1,443,672.42	1,536,911.99
P	Jasa Pendidikan	1,258,293.7	1,480,762.2	1,705,187.86	2,034,482.38	2,289,657.52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	378,314.5	444,753.2	512,723.54	584,824.48	658,005.02
R,S, T,U	Jasa lainnya	333,350.7	388,651.2	444,314.11	497,067.21	561,058.26
Produk Domestik Regional Bruto		19,144,313.1	22,339,136.5	25,491,797.49	28,068,539.86	30,589,198.90

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2.
PDRB Seri 2010 Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,673,023.9	3,852,901.9	4,047,026.08	4,176,491.88	4,305,160.74
B	Pertambangan dan Penggalian	245,520.5	244,957.3	226,095.58	246,726.70	231,750.39
C	Industri Pengolahan	956,741.4	1,045,296.5	1,124,680.82	1,163,847.66	1,198,747.17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,188.8	23,815.1	24,050.79	27,391.40	28,535.57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,050.6	29,017.7	29,612.60	30,860.53	32,766.61
F	Konstruksi	1,494,084.9	1,520,223.0	1,594,865.95	1,700,914.83	1,793,401.32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,932,248.2	2,073,157.0	2,231,121.31	2,312,512.69	2,476,779.57
H	Transportasi dan Pergudangan	223,390.9	244,231.4	248,788.00	253,856.48	269,869.74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,514,977.1	2,685,427.1	2,850,331.99	3,111,659.35	3,409,668.15
J	Informasi dan Komunikasi	1,034,298.4	1,107,804.1	1,216,479.65	1,336,330.07	1,454,962.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726,462.2	796,663.9	836,819.39	881,385.62	904,940.54
L	Real Estat	902,711.8	983,398.4	1,013,232.39	1,038,062.25	1,094,337.43
M, N	Jasa Perusahaan	109,599.0	117,960.1	126,166.48	134,294.08	142,581.74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	995,048.5	1,103,406.6	1,175,870.56	1,249,249.17	1,206,696.53
P	Jasa Pendidikan	1,107,162.7	1,226,308.7	1,337,772.90	1,492,726.41	1,616,900.16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	335,832.4	378,005.4	410,224.98	444,462.41	474,094.46
R, S, T, U	Jasa lainnya	285,850.0	308,258.7	331,702.85	359,158.01	386,919.91
Produk Domestik Regional Bruto		15,480,210.2	16,587,191.0	17,740,832.9	19,959,929.54	21,028,112.29

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.74	22.05	22.68	22.68	22.17
B	Pertambangan dan Penggalian	1.45	1.40	1.21	1.31	1.09
C	Industri Pengolahan	5.79	5.87	5.97	5.88	5.86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.09	0.12	0.14	0.17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14
F	Konstruksi	9.18	8.56	8.55	8.37	8.30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.27	11.43	11.44	11.02	11.54
H	Transportasi dan Pergudangan	1.30	1.34	1.25	1.18	1.17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.57	17.80	17.92	18.32	18.39
J	Informasi dan Komunikasi	5.38	5.18	5.21	5.23	5.30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.59	4.63	4.36	4.25	4.20
L	Real Estat	5.19	5.17	4.78	4.48	4.49
M,N	Jasa Perusahaan	0.63	0.63	0.63	0.66	0.67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.37	5.35	5.11	5.14	5.02
P	Jasa Pendidikan	6.57	6.63	6.69	7.25	7.49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.98	1.99	2.01	2.08	2.15
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.74	1.74	1.74	1.77	1.83
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Catatan : * *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2017

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.90	5.08	3.18	3.06
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.23	(7.70)	9.12	-6.07
C	Industri Pengolahan	9.26	7.59	3.47	3.02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.70	4.31	7.83	3.99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.27	2.05	5.41	5.32
F	Konstruksi	1.75	4.91	6.65	5.44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.29	7.62	3.88	7.06
H	Transportasi dan Pergudangan	9.33	1.87	4.85	3.38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.78	6.14	9.25	9.66
J	Informasi dan Komunikasi	7.11	9.81	9.76	8.88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.66	5.04	6.55	2.85
L	Real Estat	8.94	3.03	2.45	5.42
M,N	Jasa Perusahaan	7.63	6.96	6.44	6.17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.89	6.57	4.81	-2.84
P	Jasa Pendidikan	10.76	9.09	11.06	8.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.56	8.52	8.35	6.67
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.84	7.61	8.28	7.73
Produk Domestik Regional Bruto		6.78	7.15	6.02	5.40

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Catatan : * *Angka sementara*** *Angka sangat sementara*

Lampiran 5.
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Buleleng Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2017

No.	Lapangan Usaha	Atas Dasar harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	201,32	127,
2.	Pertambangan dan Penggalian	190,10	131,54
3.	Industri Pengolahan	220,93	147,76
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	291,75	163,50
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	170,46	134,18
6.	Konstruksi	232,46	164,22
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	226,06	158,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	192,43	144,58
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	276,89	167,78
10.	Informasi dan Komunikasi	197,91	177,59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	233,51	164,36
12.	Real Estat	183,48	146,08
13.	Jasa Perusahaan	219,06	151,81
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	198,81	156,09
15.	Jasa Pendidikan	265,37	187,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	252,89	182,21
17.	Jasa lainnya	232,94	160,64
Produk Domestik Regional Bruto		224,59	154,39

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Catatan : * *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

Lampiran 6.
Tabel Perkapita Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
Propinsi Bali 2016 – 2017 (Ribu Rupiah)

Kabupaten / Kota	2016	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Badung	74.947	81.325
Denpasar	47.314	51.576
Gianyar	44.290	48.264
Buleleng	42.683	46.801
Tabanan	42.566	46.601
Jembrana	40.946	44.399
Klungkung	40.334	44.251
Karangasem	32.741	35.530
Bangli	24.436	26.811

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Lampiran 7.
Laju Inflasi / Deflasi Kab. Buleleng 2015 - 2017

Kelompok	Tahun Kalender		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Laju Inflasi (%)	2,97	4,57	3,38
2. Inflasi Menurut Kelompok (%)			
a. Bahan Makanan	4,74	9,98	3,39
b. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4,22	4,08	3,15
c. Perumahan	3,33	1,83	8,44
d. Sandang	7,73	8,47	6,53
e. Kesehatan	2,61	4,65	5,02
f. Pendidikan, Rekreasi dan Olaharaga	3,29	6,24	7,48
g. Transpor dan Komunikasi	-5,23	-4,48	5,85

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Lampiran 8
 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Propinsi Bali
 1993 – 2017

Tahun	Kab. Buleleng	Prop. Bali
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1993	7,38	7,50
1994	7,42	7,93
1995	7,57	8,14
1996	5,62	5,81
1997	-2,98	-4,04
1998	1,08	0,67
1999	3,54	3,05
2000	4,09	3,57
2001	4,04	3,04
2002	4,84	3,57
2004	4,98	4,62
2005	5,60	5,56
2006	5,35	5,28
2007	5,82	5,92
2008	5,84	5,97
2009	6,10	5,33
2010	5,85	5,83
2011	6,44	6,66
2012	6,78	6,96
2013	7,15	6,69
2014	6,96	6,72
2015	6,11	6,04
2016	6,01	6,24
2017	5,59	5,40

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Lampiran 9.
 Angka agragatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita
 Kabupaten Buleleng 2016 – 2017

Rincian	Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan th. 2010	
	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)
NILAI ABSOLUT		
- PDRB Harga Berlaku (miliar Rp)	27,748.11	30,589.20
- PDRB Harga Konstan (miliar Rp)	19,950.72	21,028.11
- Jumlah penduduk pertengahan tahun(000 jiwa)	650.10	653.60
- PDRB per kapita Harga Berlaku (juta Rp)	42.68	46.8
- PDRB per kapita Harga Konstan (juta Rp)	30.69	32.17
INDEKS (2010 = 100)		
- PDRB Harga Berlaku	203.73	225.59
- PDRB Harga Konstan	146.48	154.39
- Perkembangan penduduk pertengahan tahun	103.82	104.38
- PDRB per kapita Harga Berlaku	196.24	194.2
- PDRB per kapita Harga Konstan	141.09	139.88
INDEKS IMPLISIT		
Produk Domestik Regional Bruto	139.08	145.47

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Catatan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara